

# HARMONISASI INTRA UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN BIREUEN PASCA KONFLIK ANTARA MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA

Syah Iskandar<sup>1</sup>; Zuriah<sup>2</sup>

Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Bireuen<sup>1,2</sup>

E-mail: [syahiskandarabubakar@gmail.com](mailto:syahiskandarabubakar@gmail.com)<sup>1</sup>; [zuriah27@gmail.com](mailto:zuriah27@gmail.com)<sup>2</sup>

## Abstrak

Konflik antara Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah (MU) di Indonesia pada dasarnya bukan kali pertama terjadi termasuk di Aceh. Sebagaimana diketahui bahwa di Aceh mayoritas muslimnya berafiliasi NU. Peran Ulama Dayah juga mempengaruhi gejolak antara NU dan MU di Aceh. Posisi Muhammadiyah sebagai muslim minoritas dan pemahaman masyarakat yang menganggap mereka sebagai bagian dari wahabisme di Aceh menjadi faktor terkuat penyebab konflik antara kedua kubu. Di Kabupaten Bireuen misalnya tepatnya, di kecamatan Samalanga konflik antara NU dan MU telah menimbulkan gejolak hingga mengakibatkan kepada penolakan pembangunan Masjid at-taqwa Muhammadiyah pada tahun 2016 hingga 2019. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana harmonisasi intra umat beragama antara NU dan MU pasca konflik. Dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah setempat dalam melakukan mediasi dalam memecahkan konflik antara NU dan MU. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi pada beberapa sumber terkait dengan konflik antara NU dan MU di beberapa media cetak maupun online. Kemudian peneliti juga melakukan observasi kepada masyarakat pasca konflik dan yang terakhir melakukan wawancara dengan penduduk setempat serta kepada aparat keamanan di Kecamatan Samalanga Desa Sangso. Teknik Analisis Data dilakukan dengan cara mereduksi, menyajikan dan menyimpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca terjadinya konflik terkait pemberhentian pembangunan masjid MU di kecamatan Samalanga Desa Sangso berdampak kepada ketidakharmonisan umat intra beragama Islam di kawasan tersebut.

**Kata kunci:** Harmonisasi, Konflik, Muhammadiyah, Nahdatul Ulama.

## Abstract

*The conflict between Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah (MU) in Indonesia is basically not the first time this has occurred, including in Aceh, as it is known that in Aceh, the majority of Muslims are NU-oriented. The role of Ulama Dayah also influenced the turmoil between NU and MU in Aceh. Muhammadiyah's position as a Muslim minority and the understanding of the people who regard them as part of Wahhabism in Aceh became the strongest factors causing the conflict between the two camps. In Bireun Regency, precisely in the Samalanga sub-district, the conflict between NU and MU has caused turmoil that resulted in the rejection of the mosque construction from 2016 to 2019. This study aims to examine the intra-*

*religious harmonization between NU and MU after the conflict. Furthermore, how does the local government make efforts to mediate in solving the conflict between NU and MU. This research is descriptive qualitative research with the type of field research (Field Research). The data collection technique was carried out using the documentation method on several sources related to the conflict between NU and MU in several print and online media. Then the researchers also made observations to the post-conflict community and finally conducted interviews with 1 resident and security forces in the Samalanga sub-district, Sangso village. Data analysis technique is done by reducing, presenting and concluding. The results showed that the conflict related to the termination of the construction of the MU mosque in Samalanga District, Sangso Village, impacted the disharmony of intra-religious people.*

**Keywords:** *Harmonization, Conflict, Muhammadiyah, Nahdatul Ulama.*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara majemuk yang terdiri dari banyak agama dan kepercayaan. Kondisi kultur Indonesia yang plural dapat dipandang sebagai kekayaan bangsa, namun di sisi lain kondisi Indonesia yang majemuk ini memiliki potensi yang lebih besar terhadap munculnya berbagai permasalahan sosial atau konflik.<sup>1</sup> Adanya konflik tersebut disebabkan oleh banyaknya perbedaan dalam masyarakat, seperti perbedaan antara individu, latar belakang kebudayaan, dan perbedaan kepentingan.<sup>2</sup> Sebagian para ahli dalam pendapatnya mengatakan bahwa konflik juga memiliki dampak yang positif. Namun konflik yang berkelanjutan harus menjadi perhatian bersama karena mengancam kesatuan dan persatuan bangsa dalam konteks Kebhinekaan.

Di Indonesia konflik tidak hanya terjadi karena perbedaan suku dan agama. Konflik intra agama juga kerap terjadi, seperti konflik antar aliran keagamaan dan latar belakang organisasi keagamaan yang berbeda. Munculnya konflik antar pemeluk agama yang sama atau disebut dengan intra agama tidak terjadi begitu saja. Jika kita lihat pada faktor yang menyebabkan konflik antar agama disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat maupun doktrin aliran keagamaan. Imam Hanafi mengungkapkan bahwa dalam realitas sosial sebab munculnya konflik keagamaan

---

<sup>1</sup> Subekti Masri, *Multicultural Awareness, Teknik Cinemedication, Dan Bibliotherapy*. Penerbit Aksara Timur, 2020. 3.

<sup>2</sup> Eko Sudarmanto et al., *Manajemen Konflik*. Yayasan Kita Menulis, 2021. 5.

senantiasa diawali oleh fanatisme yang berlebihan para pemeluk agama.<sup>3</sup> Begitu juga konflik intra umat beragama selalu diawali dengan rasa fanatisme yang berlebihan terhadap aliran maupun organisasi keagamaannya. Salah satu konflik intra agama yang ada di Indonesia dapat dilihat dari ketegangan antara Nahdlatul Ulama (NU) dengan Muhammadiyah (MU).

Konflik keagamaan antara Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah (MU) pada dasarnya adalah konflik lama yang hingga saat ini masih bermunculan dalam skala yang bisa dikategorikan kecil. Dalam sejarah, dua organisasi Islam ini menjadi rival yang kuat dan memiliki pengikut yang fanatis. Beberapa temuan dalam artikel berita dapat kita temukan bahwa ada banyaknya konflik yang sering terjadi antara kedua organisasi ini. Meskipun baru-baru ini juga banyak ditemukan berita-berita tentang keharmonisan antara pemuka NU dan MU dalam ranah publik namun tidak tutup kemungkinan masih adanya potensi konflik antara kedua pengikut organisasi ini di Daerah. Jika dilihat dari faktor konflik maka dominasi otoritas sangat mempengaruhi situasi minoritas dalam bertindak.

Konflik antara NU dan MU di Aceh sebagai daerah dengan syariat Islam juga tidak dapat dihindari. Peran Nahdlatul Ulama di Aceh hingga saat ini masih mendominasi arus pergerakan keagamaan. Hal ini di tandai dengan masih besarnya pengaruh kalangan santri di beberapa pesantren terutama di Kabupaten Bireuen. Otoritas Pesantren yang berorientasi Nahdlatul Ulama kian mempersempit gerakan Muhammadiyah di Aceh. Kesalahpahaman dalam memahami pergerakan Wahabi dalam perspektif Ulama Dayah di Aceh menimbulkan konflik internal antar Umat. Himpunan Ulama Dayah (HUDA) memandang pergerakan wahabi adalah sebuah aktivitas sesat dan menyesatkan. Arah dan ada sebagian dari Ulama Dayah memandang Muhammadiyah bagian dari wahabisme di Aceh.<sup>4</sup> Polemik seperti ini telah menimbulkan keresahan dalam kehidupan beragama di Aceh khususnya di Kabupaten Bireuen sebagai basis dari pergerakan Dayah. Konflik yang mewarnai kerukunan antar NU dan Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen dapat dilihat dari

---

<sup>3</sup> Imam Hanafi, "Agama Dalam Bayang-Bayang Fanatisme; Sebuah Upaya Mengelola Konflik Agama," *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 10, no. 1 (August 31, 2018): 48–67.

<sup>4</sup> Khairil Miswar, "Wahhābi Dalam Perspektif HUDA Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Sosial Keagamaan Di Aceh," *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam* 2, no. 1 (April 1, 2020): 1–27.

penolakan pembangunan di beberapa masjid Muhammadiyah di kecamatan Juli<sup>5</sup> dan di kecamatan Samalanga.<sup>6</sup>

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui bagaimana harmonisasi Umat beragama di Kabupaten Bireuen Pasca Konflik antara Muhammadiyah dan Nahdeatul Ulama. Secara khusus penelitian ini ingin mengkaji apakah efek dari konflik beragama yang telah terjadi beberapa saat silam masih mempengaruhi harmonisasi Umat Beragama di Bireuen dan Bagaimana langkah yang ditempuh para pemuka agama dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama di Kabupaten Bireuen.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian maka perlu adanya metodologi penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu sebuah pendekatan penelitian yang mencoba mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk narasi yang jelas untuk memudahkan para pembaca. Menurut Nazir metode deskriptif analitis adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta.<sup>7</sup>

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi non partisipan. Peneliti bukan bagian dari masyarakat yang di observasi sehingga menepis kemungkinan subjektivitas peneliti dalam melakukan penelitian. Observasi dilakukan pada kelompok masyarakat di daerah yang mengalami konflik intra agama antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kecamatan Samalanga Bireuen. Metode pengumpulan data selanjutnya adalah menggunakan teknik wawancara. Peneliti akan melakukan wawancara dengan beberapa tokoh di lokasi penelitian. Dalam hal ini peneliti memilih secara seimbang dengan masing-masing dua tokoh yang berasal dari Muhammadiyah dan dari kalangan Nahdlatul Ulama

---

<sup>5</sup> Mediaindonesia com developer, "Masjid Muhammadiyah Ditolak di Bireuen," last modified June 10, 2016, accessed January 24, 2022, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/50071/masjid-muhammadiyah-ditolak-di-bireuen.html>.

<sup>6</sup> Redaksi, "Sengkarut Pendirian Masjid At-Taqwa di Samalanga, Bireuen | Waspada Aceh," *Media Online Aceh*, n.d., accessed January 24, 2022, <https://waspadaaceh.com/sengkarut-pendirian-masjid-at-taqwa-di-samalanga-bireuen/>.

<sup>7</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005. 54.

Kecamatan Samalanga. Metode pengumpulan data terakhir adalah dengan studi dokumentasi pada beberapa sumber berita baik dari media cetak maupun *online*. Teknik analisis data kualitatif menggunakan tiga tahapan, melakukan Reduksi Data yaitu proses memilih data yang relevan dengan penelitian dan membuang data yang tidak relevan. Kemudian melakukan penyajian data dalam bentuk laporan penelitian dan terakhir melakukan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Harmonisasi Intra Umat Beragama**

Istilah harmonisasi dapat diartikan sebagai sebuah keselarasan, dalam pandangan yang lebih jauh harmonisasi juga dapat diartikan sebagai sebuah kecocokan, kesesuaian, keseimbangan dan keadilan sehingga memberikan rasa aman serta kedamaian dan kesejahteraan pada seluruh umat manusia. Dalam konteks umat beragama maka sebuah keharmonisan akan diwujudkan dalam bentuk interaksi antar umat beragama yang dilandasi sikap toleransi, saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai dalam kesetaraan pengamalan ajaran agama.<sup>8</sup> Harmonisasi tidak hanya ditunjukkan pada individu atau masyarakat yang berbeda Agama, melainkan harus diwujudkan juga dalam masyarakat yang berbeda pandangan dalam pengamalan agama, seperti perbedaan organisasi dakwah atau aliran.

Kondisi masyarakat yang harmonis harus senantiasa didukung oleh sikap keterbukaan dan upaya untuk melakukan dialog.<sup>9</sup> Dialog antar umat pada dasarnya merupakan sebuah manifestasi dari adanya komunikasi yang bagus. Oleh karena itu para pemuka agama harus mampu menampung segala bentuk tuntutan para pengikutnya. Wadah untuk melakukan komunikasi para umat seyogyanya benar-benar difungsikan untuk mencapai sebuah tujuan keharmonisan. Keharmonisan dalam masyarakat juga harus didukung oleh sikap saling toleransi.<sup>10</sup> Meskipun ada sebagian umat yang masih sangat fundamentalis, para pemuka atau pemimpin harus

---

<sup>8</sup> I. Wayan Wirata, "Harmonisasi Antar Umat Beragama Di Lombok," *PANGKAJA: JURNAL AGAMA HINDU* 21, no. 1 (July 4, 2018): 75–76, accessed January 25, 2022, <http://ejournal.ihdn.ac.id/index.php/PJAH/article/view/545>.

<sup>9</sup> Mahyuddin et al., *Agama dan Masyarakat Multikultural Pilar-Pilar Membangun Kebersamaan Dalam Perbedaan* (IAIN Parepare Nusantara Press, n.d.), 43.

<sup>10</sup> Mahyuddin et al., *Agama dan Masyarakat Multikultural Pilar-Pilar Membangun Kebersamaan Dalam Perbedaan*.

mampu menekan sikap anarkisme demi mewujudkan kedamaian dan menghindari pergesekan dalam bermasyarakat. Sebagaimana perannya para tokoh agama diharapkan mampu menjaga kerukunan antar umat dalam masyarakat.<sup>11</sup>

Harmonisasi tidak dapat dipahami tanpa adanya konflik keagamaan. Istilah harmonisasi menjadi penting sebagai sisi lain dari kedamaian yang ingin dicapai pasca terjadinya konflik keagamaan. Diantara penyebab terjadinya konflik keagamaan menurut Febby Febriyandi Y.S adalah karena perbedaan penafsiran dan praktik ritual agama.<sup>12</sup> Konflik tidak hanya terjadi antar pemeluk agama, namun juga terjadi pada sesama pemeluk yang memiliki pemikiran atau ideologi yang berbeda. Menurut Rumagit sebagaimana dikutip oleh Febby mengatakan bahwa konflik antar umat beragama di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor seperti perbedaan doktrin agama, perbedaan suku dan ras atau perbedaan agama itu sendiri, perbedaan kebudayaan dan persoalan mayoritas dan minoritas pemeluk agama.<sup>13</sup>

Dalam kaitannya antar umat beragama harmonisasi juga penting dibangun mengingat ada begitu banyak organisasi dan aliran kepercayaan yang berada di bawah sebuah agama. selama ini konflik juga kerap terjadi antar pemeluk agama dikarenakan perbedaan pandangan terutama dalam pengamalan agama. Pemuka agama dan pemerintah dapat mengambil perannya dalam berupaya mewujudkan masyarakat yang toleransi dan saling menghormati. Toleransi yang ditunjukkan dalam bentuk saling menerima perbedaan pendapat oleh masing-masing individu. Sikap saling pengertian dan menghormati apa yang ada pada ideologi masing-masing. Saling menghargai dalam kesetaraan pengamalan ajaran agama dapat ditunjukkan dengan adanya kesempatan yang sama diberikan kepada minoritas untuk menjalankan ibadah dan ideologi yang sama dengan pihak mayoritas. Hingga pada akhirnya terciptanya suasana yang aman dan damai yang membuat siapapun yang berada di lingkungan tersebut tidak merasa terancam dan terdiskriminasi.

---

<sup>11</sup> Yosep Belen Keban dkk, *Harmonisasi Umat Beragama* (Global Aksara Pers, n.d.), 71.

<sup>12</sup> Febby Febriyandi.YS, "Agama, Ritual, Dan Konflik: Suatu Upaya Memahami Konflik Internal Umat Beragama Di Indonesia," *Handep: Jurnal Sejarah dan Budaya* 2, no. 2 (June 17, 2019): 123–142.

<sup>13</sup> *Ibid.*, 126.

## 2. Konflik Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Di Aceh

Harmonisasi yang harus diwujudkan tidak hanya antar beragama atau antara suatu agama dengan agama lain, melainkan juga harus diwujudkan harmonisasi intra agama. Sebagaimana dipahami bahwa dalam sejarah perkembangan Islam di Dunia ada begitu banyak perbedaan pendapat maupun mazhab yang hingga saat ini perbedaan tersebut muncul dalam beberapa organisasi yang berbeda. Di Indonesia perbedaan yang sangat mencolok dimunculkan oleh para agamawan yang memiliki latar belakang organisasi Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah (MU).

NU dan MU merupakan dua organisasi dakwah terbesar di Indonesia. Nahdlatul Ulama didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya oleh KH Hasyim Asyari, sedangkan Muhammadiyah telah didirikan lebih dahulu oleh KH Ahmad Dahlan yaitu pada tanggal 18 November 1912. Meskipun secara historis Muhammadiyah datang lebih dahulu secara keorganisasian namun dalam sisi lain para ulama yang berafiliasi kepada Nahdlatul Ulama sudah ada sejak dahulu. Perbedaan karakteristik dakwah dan sistem terkadang membuat kedua pengikut saling mengklaim dirinya benar yang berakibatkan kepada konflik horizontal di kalangan masyarakat.<sup>14</sup>

Aceh sebagai daerah yang menjunjung tinggi syariat Islam juga tidak dapat melepaskan diri dari adanya gejolak antara NU dan MU, hal ini dapat dilihat dari adanya konflik antara NU dan MU di Kabupaten Bireuen tepatnya di Kecamatan Samalanga. MU sebagai basis yang sangat kuat karena secara politis didominasi oleh pesantren yang berafiliasi kepada NU, Sedangkan NU merupakan minoritas. Kesalahpahaman dalam memahami pergerakan wahabi dalam perspektif Ulama Dayah di Aceh menimbulkan konflik internal antar Umat. Himpunan Ulama Dayah (HUDA) memandang pergerakan wahabi adalah sebuah aktivitas sesat dan menyesatkan. Arah dan ada sebagian dari Ulama Dayah memandang Muhammadiyah bagian dari wahabisme di Aceh.<sup>15</sup> Kondisi ini tentu menimbulkan keresahan dalam kehidupan beragama yang dirasakan oleh MU sebagai minoritas. Asumsi tersebut kemudian mengarahkan pergerakan masyarakat menuju konflik

---

<sup>14</sup> Sabiruddin Sabiruddin, "Nahdatul Ulama (NU) Dan Muhammadiyah: Dua Wajah Organisasi Dakwah Di Indonesia," *Al Imam: Jurnal Manajemen Dakwah* (2018): 9–16.

<sup>15</sup> Miswar, "Wahhâbi Dalam Perspektif HUDA Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Sosial Keagamaan Di Aceh."

yang menodai kerukunan antar NU dan Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen dapat dilihat dari penolakan pembangunan di beberapa masjid Muhammadiyah di kecamatan Juli<sup>16</sup> dan di Kecamatan Samalanga.<sup>17</sup>

Konflik yang terjadi pada masyarakat Muhammadiyah di kecamatan Samalanga masih belum mendapatkan penyelesaian dengan baik. Pada Mei 2022 terjadi penghentian sementara proses pembangunan masjid yang dilakukan oleh Satpol PP setempat.<sup>18</sup> Peristiwa pemberhentian pembangunan masjid yang dilakukan secara paksa oleh satpol PP Bireuen mendapatkan respon dari Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah. Melalui media online CNN Indonesia ia menyesalkan peristiwa pemberhentian pembangunan masjid Muhammadiyah yang ada di kecamatan Samalanga tersebut. Menurut Amirsyah tindakan yang dilakukan sangat bertentangan dengan amanah konstitusi sebagaimana yang tertera dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) bahwa negara menjamin hak warga negara untuk beribadah sesuai dengan agama masing-masing.<sup>19</sup> Hingga saat ini dari penelusuran peneliti masjid yang menjadi sengketa tersebut masih ditunda pembangunannya.

### 3. Harmonisasi Intra Umat Beragama Pasca Konflik

Konflik antara Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama yang terjadi di Kecamatan Samalanga masih belum mencapai titik temu. MU di kecamatan Samalanga merupakan minoritas yang hidup di tengah-tengah mayoritas yang berafiliasi kepada NU. Pasalnya Kecamatan Samalanga dikenal juga dengan Kota Santri. Mayoritas penduduk dan ditambah dengan ada banyaknya pendatang sebagai santri membuat minoritas MU semakin tersisihkan. Pasca terjadinya pemberhentian secara paksa pembangunan masjid MU di Kecamatan Samalanga tergambar jelas bahwa keharmonisan Umat menjadi terganggu. Pemberhentian

<sup>16</sup> Developer, "Masjid Muhammadiyah Ditolak di Bireuen."

<sup>17</sup> Redaksi, "Sengkarut Pendirian Masjid At-Taqwa di Samalanga, Bireuen | Waspada Aceh."

<sup>18</sup> "Episode Panjang Penolakan Masjid Muhammadiyah Di Samalanga, Sosiolog: Sarat Muatan Politis," *Sahih.Co*, May 27, 2022, accessed September 2, 2022, <https://www.sahih.co/2022/05/27/episode-panjang-penolakan-masjid-muhammadiyah-di-samalanga-sosiolog-sarat-muatan-politis/>.

<sup>19</sup> C. N. N. Indonesia, "MUI Sesalkan Pembongkaran Tiang Masjid Muhammadiyah di Aceh," *nasional*, accessed September 2, 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220513220038-20-796636/mui-sesalkan-pembongkaran-tiang-masjid-muhammadiyah-di-aceh>.

pembangunan masjid MU tersebut dilaksanakan atas izin pemerintah setempat untuk meminimalisirkan gejolak masa. Izin pembangunan masjid MU masih terhalangi dan tidak dapat dilanjutkan pasca pemberhentian yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bireuen. Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan Masjid MU di wilayah setempat memiliki kendala dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Kehidupan beragama yang didominasi oleh NU di kecamatan Samalanga menunjukkan kondisi yang tidak harmonis. Dari wawancara yang dilakukan kepada beberapa masyarakat pasca konflik hubungan antara masyarakat yang berafiliasi ke NU dan MU menjadi kurang harmonis. Bhabinkamtibmas Gampong Sangso kecamatan Samalanga mengungkapkan bahwa:

“Pasca insiden konflik tersebut banyak terjadi gejolak di masyarakat, terutama karena masyarakat disini lebih banyak NU karena juga banyak santri dan pesantren. Meskipun demikian tidak dapat dipungkiri sebelum insiden tersebut sudah ada indikasi ketidak senangan terhadap MU karena perbedaan pemahaman agama. Kemudian karena MU mulai membangun masjid itu bisa dianggap oleh masyarakat bahwa mereka akan semakin kuat dan dikhawatirkan akan lebih mendominasi.”<sup>20</sup>

Dari wawancara tersebut di atas terlihat bahwa posisi NU sebagai mayoritas membuat MU semakin tidak disenangi. Ketidak harmonisan antara NU dan MU juga harus disadari bukan hanya terjadi karena insiden penolakan pembangunan masjid MU, melainkan sebagai dampak dari penolakan terhadap MU yang sudah lama dipermasalahkan. Dalam wawancara lebih lanjut kepada salah satu warga setempat juga mengatakan hal yang hampir sama, yaitu sebagai berikut:

“Kalau sampai sekarang antara MU dan NU masih kurang harmonis pasca konflik masjid kemarin. Karena disini Mayoritasnya kan orang pesantren, jadi dari dulu sudah tidak setuju. Pada awalnya para jamaah yang datang dari pesantren yang menolak dan mencoba menghentikan proses pembangunan masjid. Masyarakat juga mendesak pemerintah untuk menghentikan pembangunan masjid. Makanya kemarin langsung diturunkan satpol pp untuk menghentikan pembangunannya.”

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bhabinkamtibmas Gampong Sangso Kecamatan Samalanga, Brigadir Jazuli pada tanggal 20 September 2022.

Keterlibatan pemerintah dilakukan untuk meredam kemarahan publik yang sebagaimana diketahui mayoritas berafiliasi kepada NU. Dalam amatan peneliti bahwa sebagai mayoritas NU yang juga memiliki beberapa tokoh yang kuat di pemerintahan membuat MU di kecamatan Samalanga memiliki ruang gerak yang sempit. Jika dilihat dalam perspektif demokrasi maka mayoritas akan mendominasi, namun dalam perspektif keadilan dan kebebasan masyarakat mengekspresikan nilai keagamaan menjadi keliru jika tidak ditangani dengan tepat.

Ketidakharmonisan dalam kehidupan masyarakat beragama yang terjadi di Kecamatan Samalanga diindikasikan terjadi karena tidak adanya dialog dan sikap saling terbuka antara pemeluk agama. Harmonisasi harus senantiasa didukung oleh sikap keterbukaan dan upaya untuk melakukan dialog.<sup>21</sup> Sehingga tanpa adanya sikap saling terbuka dan kemauan untuk membuka ruang diskusi dan dialog maka keharmonisan antar umat tidak akan terwujud. Sikap keterbukaan juga dipengaruhi oleh bagaimana persuasi yang dibangun oleh pemuka agama kepada para jamaah. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa keharmonisan akan diwujudkan dalam bentuk interaksi antar umat beragama yang dilandasi sikap toleransi, saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai dalam kesetaraan pengamalan ajaran agama.<sup>22</sup>

Namun yang menjadi permasalahannya adalah klaim kebenaran yang lebih mendominasi salah satu kubu akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Tanpa adanya upaya menurunkan ego mayoritas dan membuka ruang terhadap penerimaan kondisi yang berbeda maka keharmonisan tidak akan pernah dapat diwujudkan.

## **KESIMPULAN**

Konflik antara NU dan MU di Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen terkait dengan pembangunan masjid MU merupakan konflik yang sudah ada sejak dahulu yang mempengaruhi keharmonisan umat beragama. pasca konflik, keharmonisan intra umat beragama dapat dikatakan tidak harmonis. Mayoritas

---

<sup>21</sup> Mahyuddin et al., *Agama dan Masyarakat Multikultural Pilar-Pilar Membangun Kebersamaan Dalam Perbedaan* (IAIN Parepare Nusantara Press, n.d.), 43.

<sup>22</sup> I. Wayan Wirata, "Harmonisasi Antar Umat Beragama Di Lombok," *PANGKAJA: JURNAL AGAMA HINDU* 21, no. 1 (July 4, 2018): 75–76, accessed January 25, 2022, <http://ejournal.ihdn.ac.id/index.php/PJAH/article/view/545>.

masyarakat yang berafiliasi kepada NU membuat MU semakin tersisihkan. Oleh karena itu dalam menyikapi hal ini pemerintah Kabupaten Maupun Kecamatan setempat harus melakukan upaya penyelesaian yang bijak, karena berkaitan dengan kepentingan berbagai pihak, terutama pihak MU sebagai minoritas yang tidak diuntungkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Belen Keban, Yosep, dkk. *Harmonisasi Umat Beragama*. Global Aksara Pers, n.d
- Febriyandi.YS, Febby. "Agama, Ritual, Dan Konflik: Suatu Upaya Memahami Konflik Internal Umat Beragama Di Indonesia." *Handep: Jurnal Sejarah dan Budaya* 2, no. 2 (June 17, 2019): 123–142.
- Hanafi, Imam. "Agama Dalam Bayang-Bayang Fanatisme; Sebuah Upaya Mengelola Konflik Agama." *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 10, no. 1 (August 31, 2018): 48–67.
- Indonesia, C. N. N. "MUI Sesalkan Pembongkaran Tiang Masjid Muhammadiyah di Aceh." *nasional*. Accessed September 2, 2022. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220513220038-20-796636/mui-sesalkan-pembongkaran-tiang-masjid-muhammadiyah-di-aceh>.
- Mahyuddin, Ilham, Nugrahayu, Silmi Qurota Ayun, Nur Aslina, A. Jurana Anggriana, Fitriani, Muhammad Rusdi Talib, Masna, and Nur Nadiya Rahma. *Agama dan Masyarakat Multikultural Pilar-Pilar Membangun Kebersamaan Dalam Perbedaan*. IAIN Parepare Nusantara Press, n.d.
- Masri, Subekti. *Multicultural Awareness, Teknik Cinemeducation, Dan Bibliotherapy*. Penerbit Aksara Timur, 2020.
- Miswar, Khairil. "Wahhâbi Dalam Perspektif HUDA Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Sosial Keagamaan Di Aceh." *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam* 2, no. 1 (April 1, 2020): 1–27.
- Misbahul "Episode Panjang Penolakan Masjid Muhammadiyah Di Samalanga, Sosiolog: Sarat Muatan Politis." *Sahih.Co*, May 27, 2022. Accessed September 2, 2022. <https://www.sahih.co/2022/05/27/episode-panjang-penolakan-masjid-muhammadiyah-di-samalanga-sosiolog-sarat-muatan-politis/>.
- MR/FD, *mediaindonesia.com*. "Masjid Muhammadiyah Ditolak di Bireuen." Last modified June 10, 2016. Accessed January 24, 2022. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/50071/masjid-muhammadiyah-ditolak-di-bireuen.html>.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Paisal, Jon. "Peran Ulama dalam Masyarakat Aceh dari Masa Kemasa." *At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam* (2021): 89-104.

- Redaksi. “Sengkarut Pendirian Masjid At-Taqwa di Samalanga, Bireuen | Waspada Aceh.” *Media Online Aceh*, n.d. Accessed January 24, 2022. <https://waspadaaceh.com/sengkarut-pendirian-masjid-at-taqwa-di-samalanga-bireuen/>.
- Sabiruddin, Sabiruddin. “Nahdatul Ulama (NU) Dan Muhammadiyah: Dua Wajah Organisasi Dakwah Di Indonesia.” *Al Imam: Jurnal Manajemen Dakwah* (2018): 9–16.
- Sudarmanto, Eko, Diana Purnama Sari, David Tjahjana, Edi Wibowo S, Sri Siska Mardiana, Bonaraja Purba, Sukarman Purba, et al. *Manajemen Konflik. Yayasan Kita Menulis*, 2021.
- Wirata, I. Wayan. “Harmonisasi Antar Umat Beragama Di Lombok.” *PANGKAJA: JURNAL AGAMA HINDU* 21, no. 1 (July 4, 2018). Accessed January 25, 2022. <http://ejournal.ihdn.ac.id/index.php/PJAH/article/view/545>.